

ABSTRAK

PERAN STAKE HOLDER DAN PROVIDER KOTA BATAM DALAM UPAYA MENINGKATKAN CLINICAL GOVERNANCE PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Tiara Indah P.S. 2009. Pembimbing : Dr. Felix Kasim., dr., M.Kes.

Deming (1984), Crosby (1979, 1985), maupun Juran (1988), semuanya menemukan bahwa lebih dari 85 % kesalahan terkait dengan sistem, sedangkan hanya 15 % yang memang benar kesalahan manusia atau pekerja. Menurut opini Koordinator LSM Kesehatan, Iskandar Sitorus, mereka mencatat sekitar 2.000 korban malpraktik di seluruh Kepulauan Riau (Kepri). Kesalahan terjadi ketika sistem tidak memiliki kebijakan yang tepat, prosedur standar, dan perlengakapan yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penatalaksanaan, hambatan serta harapan yang berkaitan dengan penatalaksanaan *Clinical Governance* ditinjau dari peran *stakeholder* dan *provider* kota Batam.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan penelitian *grounded theory*. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam. Responden yang diambil adalah Ketua Komisi IV DPRD kota Batam Kepri, Ketua Komite Medik RSUD Batu Aji kota Batam Kepri dengan metode pengambilan sampel *Purposive sampling* dengan pendekatan *extreme case sampling*.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan *Clinical Governance* oleh *stakeholder* dan *provider* masih belum cukup baik. Masih banyaknya kendala dalam regulasi dan implementasi *Clinical Governance*. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota Batam 2008 beberapa indikator masih belum memenuhi target kinerja dan standar nasional. Dengan demikian, sistem *Clinical Governance* belum dilakukan secara menyeluruh pada pelayanan kesehatan di kota Batam.

Kata kunci : *Clinical Governance, stakeholder, provider*

ABSTRACT

ROLES OF THE STAKE HOLDER AND PROVIDER OF BATAM CITY IN AN ATTEMPT TO ENHANCE CLINICAL GOVERNANCE OF HEALTH SERVICES IN CONNECTION WITH DOCTOR PRACTICE LAWS

Tiara Indah P.S. 2009. Tutor : Dr. Felix Kasim., dr., M.Kes

Deming (1984), Crosby (1979, 1985), and Juran (1988), all found that more than 85% of errors are related to a system; whereas, only 15% of them constitute human error, or an employee's. According to NGO coordinator, Iskandar Sitorus, 2000 victims of malpractice have been recorded throughout Kepulauan Riau (Kepri). This malpractice occurs when a system does not have a proper policy, standard procedure, and equipment needed.

This research aims to find out the management, obstacles, and expectations with regards to clinical governance management from the point of view of the stakeholder and provider of Batam City.

This research employs a qualitative method with a grounded theory. The primary data are derived from in-depth interview. The respondents involved are the commission IV chairperson of Batam City local Parliament, Kepri, chairperson of Medical Committee of Batu Aji Local Public Hospital Kepri using a purposive sampling with an extreme case sampling approach.

The research shows that clinical governance by the stakeholder and provider still needs further improvement. There are still obstacles in terms of regulations and implementation of clinical governance. Based on the Minimum Service Standard, some indicators of Batam City in 2008 did not meet the performance target and national standard. Therefore, the clinical governance system has not been implemented throughout health services in Batam City.

Keywords: Clinical Governance, stakeholder, provider

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud Penelitian	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran	4
1.6 Metode Penelitian	5
1.6.1 Metode Penelitian	5
1.6.2 Rancangan Penelitian	5
1.6.3 Teknik Pengambilan Data	5
1.6.4 Metode Pengambilan Sampel	5
1.6.5 Instrumen Penelitian	5
1.6.6 Informan	5
1.6.7 Teknik Analisis Data	5
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	6
1.7.1 Lokasi Penelitian	6

3.2.6 Aspek Etika Penelitian	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Batam	36
4.1.1 Keadaan geografis Kota Batam	36
4.1.2 Pemerintahan Kota Batam	37
4.1.3 Kependudukan Kota Batam	37
4.2 Analisis Kualitatif Ketua Komisi IV DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Batam Kepri	37
4.2.1 Open Coding	37
4.2.2 Selective Coding	39
4.2.3 Main Theory	40
4.3 Analisis kualitatif Komite Medik RSUD Batu Aji Batam Kepri	43
4.3.1 Open Coding	43
4.3.2 Selective Coding	46
4.3.3 Main Theory	49
4.4 Data Sekunder Pada Dinas Kesehatan Kota Batam	52
4.4.1 Standar Pelayanan Minimal Kota Batam	52
4.4.2 Situasi Sumber Daya Kesehatan Kota Batam	62
4.4.3 Tenaga Kesehatan	62
4.5 Perbandingan Analisis Kualitatif Dengan Observasi Langsung Data Sekunder	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Standar Pelayanan Minimal Data Kinerja tahun 2008 Dan Target Kinerja 2009, 2010 kota Batam	53
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Peran dan hubungan organisasi profesi, kolegium, rumah sakit dan sarana dalam <i>Clinical Governance</i> dalam rangka keamanan pasien (<i>patients safety</i>)	26
Gambar 4.1.1 Kota Batam	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Mendalam	70
Lampiran 2 Transkip Wawancara Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam	73
Lampiran 3 Transkip Wawancara Ketua Komite Medik RSUD Batu Aji Batam	76
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Fakultas Kedokteran Maranatha	80
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian DPRD Kota Batam	81